

**PERGESERAN HUKUM WARIS ADAT DI KALANGAN
MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN NONGSA PROPINSI
KEPULAUAN RIAU**

CONNY RIMAWATI

ABSTRACT

The first conclusion is that the shift of the principles of inheritance in Malay adat in Nongsa subdistrict can be seen from the fact that the heirs in Malay community in Nongsa subdistrict have the right to receive inheritance but the priority is for the members of nuclear family (husband, wife, children) unless the heir is still single and has no child. Inheritance distribution system which used to be based on faraid law changes into the inheritance distribution using the way deliberation and consensus to seek justice that receive the same amount. The second was that the factors influencing the development of inheritance law of Malay adat in Nongsa subdistrict Kepulauan Riau province were the significant impact of modernization on kinship relation, Islamic law compilation and jurisprudence. The third was that the role of adat institution in Nongsa Subdistrict, Kepulauan Riau Province was more prioritized to settle the inheritance disputes rather than through the court of law. Meaning that family relationship in Nongsa subdistrict is still very strong and the advice of adat leader and the Islamic scholars is still used as guidance in settling the problems occurred. The adat institution also plays an important role in improving the brotherhood relationship that has been damaged by dispute.

Keywords: Shift, Adat Inheritance, Malay Community, Nongsa Subdistrict

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat, menurut Von Savigny bahwa manusia di dunia ini terdiri atas berbagai bangsa dan tiap-tiap bangsa itu mempunyai jiwa bangsa sendiri yang disebut dengan “*volksgeist*”, jiwa bangsa ini berbeda satu dengan yang lain menurut tempat dan waktu, jiwa bangsa itu tidak statis dan selalu berubah-ubah menurut keadaan masyarakat pada zaman ke zaman, setiap masyarakat mempunyai *volksgeist* sendiri atau adat istiadat sendiri yang berbeda dengan bangsa lain.¹ Suku Melayu adalah sebagai salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia dan yang dimaksud suku Melayu Riau adalah orang-orang yang menyatukan dirinya dalam suatu pembauran yang serasi, kemudian menyatakan golongannya sebagai suku Melayu Riau serta

¹Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), hal 108-109

memakai adat dan budaya Melayu secara sadar dan berkelanjutan²

Bagi masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa, seperti suku Melayu di daerah lainnya pada dasarnya mereka menganut prinsip kekerabatan *parental*, oleh karena itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah maupun pihak ibu. Dengan kata lain hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan kaum kerabat dari pihak ayah tetap sederajat dengan perhubungannya terhadap kaum kerabat ibunya. Oleh karena ini dikenal pepatah “*Anak dipangku kemenakan dijinjing*”.

Prinsip *bilateral* itu sesungguhnya tidak mempunyai suatu akibat yang selektif, karena bagi setiap individu semua kaum kerabat ibu maupun semua kerabat kaum ayah masuk dalam hubungan kekerabatannya. Sehingga tidak ada batas sama sekali. Orang Melayu mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Mereka memiliki prinsip “*adat menurun, syarak mendaki, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”, artinya “segala ketentuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat berasal dari budaya nenek moyang dan bersumber dari ajaran-ajaran agama, yaitu *Al quran* dan *Hadits*”.

Suatu kombinasi yang timbul dari dua prinsip yang berlainan nampak pada penentuan hak waris, terutama penyelesaian masalah hak waris. Keberadaan Islam dengan Fikh-nya yang *patrilineal* dan hukum adat Melayu berdasarkan pada “*Adat Lamo Puseko Usang*” yaitu “Undang” dengan “Teliti”. “Undang” yang dimaksud disini adalah peraturan adat istiadat yang berasal dari nenek moyang dan aturan-aturan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan “Teliti” adalah peraturan adat istiadat yang telah dipengaruhi dan diperkuat oleh agama Islam.

“Undang” dan “Teliti” ini disatukan menjadi satu kesatuan sehingga menjadi adat istiadat Melayu yang berasaskan dasar yaitu adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Maka kita dapat melihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa adalah hukum adat yang tidak terlepas dari ajara Islam karena masyarakat Melayu Riau di Kecamatan Nongsa mayoritas beragama Islam, dalam hal pewarisan yang digunakan adalah hukum waris Islam, Sehingga yang dimaksud hukum waris adat bagi masyarakat Melayu adalah

² T.H.M Lah Husny, *Lintasan Sejarah dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Sumatera Timur*, (Medan, Penerbit BP Husny, 1975), hal 66

hukum waris Islam dan semua pengaturan yang diatur dalam hukum waris Islam menjadi landasan bagi menyelesaikan masalah waris pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa.

Pergeseran pandangan dan penilaian dalam hukum pewarisan mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Menurut Eugen Ehrlich “*At the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, not in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*” (Pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada Undang-Undang, tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakatnya sendiri.).³ Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pergeseran tersebut yaitu:⁴

1. Terjadinya pergeseran kehidupan keluarga dari kehidupan keluarga besar (kekerabatan) kearah lebih mengutamakan kepentingan kehidupan keluarga kecil (keluarga inti), telah menciptakan hubungan solidaritas antara suami isteri dan anak-anak semakin erat. Keadaan ini mempengaruhi pandangan suami-isteri tentang kedudukan harta kekayaan mereka dalam perkawinan.
2. Kemajuan di bidang pendidikan, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya di dalam masyarakat, menyebabkan partisipasi isteri dalam memperoleh harta kekayaan semakin besar bahkan kadang-kadang melebihi suami.
3. Kemajuan di bidang teknologi transportasi dan informasi yang telah menyebabkan *mobilisasi* orang-orang begitu cepat, berbagai kemajuan peristiwa yang terjadi ditempat lain bahkan dibelahan dunia manapun dengan cepat dapat dibaca, didengar atau dilihat melalui berbagai sarana komunikasi modern, sehingga hampir tidak ada lagi daerah di Indonesia yang terisolir, hal ini tentu mempengaruhi pola pikir masyarakat termasuk dalam bidang hukum harta kekayaan perkawinan.

Hak waris yang diatur dalam hukum Islam dengan Fikh-nya yang *patrilineal* yang biasanya dahulu digunakan masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa maka sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, hukum waris adat pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa mengalami perubahan pada beberapa bentuk pelaksanaannya dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu Kompilasi Hukum Islam, adanya *yurisprudensi* dan pengaruh budaya hukum.

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 424

⁴ Runtung Sitepu, *Kapita Selekta Hukum Adat*, (Medan: Bahan Kuliah Pada Program Studi S2, Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2012), hal 2

Pergeseran dalam hal pewarisan pada masyarakat Melayu khususnya di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepri yang berada di Kelurahan Batu Besar dan Kelurahan Sambau seiring dengan perkembangan zaman tersebut maka perlu diteliti yaitu sejauh manakah mereka meyakini, menghayati dan mempraktekkan hukum pewarisan Islam dengan segala faktor yang mempengaruhinya. Dari latar belakang tersebut diatas maka diangkat judul penelitian tesis tentang “Pergeseran Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepulauan Riau (Kepri). Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah:

- A. Bagaimanakah pergeseran prinsip-prinsip pewarisan yang hidup pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepri?
- B. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan hukum Waris Adat Melayu di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepri?
- C. Bagaimanakah peranan Lembaga Adat dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepri?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- A. Untuk mengetahui pergeseran prinsip-prinsip pewarisan yang hidup pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepri.
- B. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Waris Adat Melayu di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepri.
- C. Untuk mengetahui peranan Lembaga Adat dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *deskriptif* yaitu menceritakan perbandingan penggunaan hukum waris adat yang diterapkan masyarakat di daerah Kecamatan Nongsa Kepulauan Riau tersebut dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis (empiris)*,⁵ untuk mengetahui keadaan yang berhubungan dengan permasalahan penggunaan hukum waris adat di masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa yang dipengaruhi perkembangan zaman.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal 14

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pergeseran Prinsip-Prinsip Pewarisan Yang Hidup Pada Masyarakat Melayu Di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepulauan Riau

Masyarakat Melayu pada umumnya memeluk agama Islam, sehingga mereka memiliki prinsip adat menurun, syarak mendaki, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah yang artinya segala ketentuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat selain berasal dari budaya nenek moyang juga bersumber dari ajaran-ajaran agama yang terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *hadist*, semua yang diatur dalam *Al-Qur'an* dan *hadist* menjadi bagian yang termasuk dalam kehidupan adat istiadat masyarakat Melayu, dan karena masalah pewarisan ada diatur dalam *Al-Qur'an* dan *hadist* maka sistem waris adat Melayu berdasarkan Hukum Islam, jadi yang dimaksud dengan sistem pembagian waris tradisional pada masyarakat Melayu adalah mengacu pada tata cara hukum *faraid*⁶

Syarat-syarat pewarisan pada masyarakat Melayu lebih banyak dirunut berdasarkan hukum Islam yang sering disebut dengan hukum *faraid* (pewarisan). Dalam Hukum Islam dinyatakan dengan tegas syarat-syarat pewarisan dan besarnya pembagian yang didapat oleh anak laki-laki dan anak perempuan.⁷ Karena hukum wans adat Melayu bersumber dari *Al-Qur'an* dan *hadist* maka sistem hukum wans adat Melayu sama dengan sistem kewarisan Islam yaitu sistem individual bilateral, dan ciri-ciri dari sistem kewarisan individual bilateral adalah:⁸

- a). Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris.
- b). Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya setidaknya dengan ibunya, prinsip diatas maksudnya adalah jika orang tua pewaris dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya.
- c). Bahwa suami isteri saling mewaris artinya pihak yang hidup terlama menjadi ahli waris dari pihak lain.

Ahli waris menurut hukum waris adat Melayu tradisional sama seperti ahli waris dalam hukum Islam, yang secara garis besar golongannya dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:⁹

- a) Ahli waris menurut *Al-Qur'an* yang disebut *Dzul Fara'idh*
Yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.
- b) Ahli waris *Ashabah*

⁶ Wawancara dengan Raja Muhammad Zein, *Peneliti Lembaga Adat Melayu kota Batam (Pemangku Adat)*, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014.

⁷ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Triginta Karya, 1995), hal 16.

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Tinta Mas, Tanpa Tahun), hal 14-15.

⁹ *Ibid*, hal 17.

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian sisa yang terbagi atas :

- (1) *Ashabah Binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa.
- (2) *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki.
- (3) *Ashabah Ma'alghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris.

c) Ahli Waris *Dzul Arham*

Yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.

Masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa mengikuti garis keturunan pewarisan gelar anak diambil dari pihak ayah dalam hal ini cenderung mengikuti keturunan secara *patrilineal*, namun dalam tata cara adat pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Nongsa, pihak laki-laki yang datang ke rumah perempuan, hal ini cenderung mengikuti aturan adat dalam ketentuan *matrilinial*. Akan tetapi dalam sistem kekerabatan senantiasa mengikuti sistem Bilateral.¹⁰

Masyarakat Melayu di kecamatan Nongsa yang beragama Islam menyelesaikan pewarisan adatnya dahulu masih menggunakan hukum waris adat Melayu Tradisional dengan menggunakan sistem pewarisan individual *bilateral* berdasarkan hukum *faraid* tetapi sekarang ini masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa dalam hal pelaksanaan pewarisannya telah mengalami pergeseran prinsip-prinsip pewarisannya tetapi tidak melanggar aturan dalam hukum *faraid* seperti dengan cara melakukan pembagian waris dengan dua kali pembagian yang pertama seluruh ahli waris menerima bagiannya berdasarkan hukum *faraid* kemudian ahli waris yang mendapat bagian yang lebih besar memberikan bagiannya kepada ahli waris yang menerima bagian yang lebih kecil, dalam hal ini disebut dengan pemberian dan sistem pewarisan pada masyarakat Melayu di kecamatan Nongsa telah lebih mengarah pada pewarisan untuk mencapai musyawarah dan mufakat agar para pihak dalam keluarga ini mendapatkan keadilan dengan bagian yang sama sehingga semua pihak merasa tidak ada yang dirugikan dan saling ikhlas dalam menerima bagiannya masing-masing.¹¹

Pergeseran prinsip-prinsip yang ada di kecamatan Nongsa ini dapat dilihat

¹⁰ Wawancara dengan Abdul Wahab M, *Ketua Yayasan Kampong Melayu Batu Besar atau Tokoh Melayu*, Pada hari Rabu 7 Mei 2014.

¹¹ Wawancara dengan Raja Muhammad Zein, *Peneliti Adat Lembaga Adat Melayu*, Pada hari Senin Pada Tanggal 12 Mei 2014.

dari kasus-kasus seperti:

Kasus I

Almarhum H. Ali Achmad meninggalkan dua buah rumah dan sebidang tanah, beliau memiliki tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Semasa hidupnya beliau telah memberikan sebuah rumah yang beliau tempati kepada anak perempuannya dengan cara menghibahkannya. Menurut keterangan isterinya hal tersebut beliau lakukan karena ingin membagi harta yang dimilikinya dalam porsi yang sama kepada seluruh anak-anaknya. Dan dalam hal ini anak perempuannya yang mengurus beliau serta isterinya dalam keadaan sakit sedangkan ketiga anak laki-lakinya kerja diluar kota. Namun setelah almarhum meninggal dunia, seharusnya harta warisan dibagi secara hukum *faraid* namun ketiga saudara laki-lakinya menurut pengakuan ibunya membagi harta warisan yang ditinggalkan almarhum tidak menggunakan hukum *faraid* malahan membaginya sama rata dengan adik perempuan mereka.

Kasus II

Almarhum Sofyan memiliki seorang anak yaitu anak perempuan, setelah almarhum meninggal maka diadakan musyawarah mufakat, yang mana berdasarkan hukum Islam paman-pamannya (saudara laki-laki almarhum) berhak dari harta almarhum, namun setelah musyawarah mufakat dengan menghitung harta almarhum dan hutang-hutangnya maka dua orang saudara laki-laki almarhum setelah membagi harta warisan tersebut dengan cara hukum *faraid*, mereka mengembalikan kembali bagian mereka kepada kemenakannya dengan cara pemberian, dengan alasan pemberian itu sebagai bantuan mereka kepada kemenakannya untuk biaya sekolah dan penghidupannya kelak. Dalam kasus ini mereka tetap menjalankan pembagian secara *faraid* tetapi tetap saja harta dari almarhum diterima anak perempuannya secara penuh karena paman-pamannya mengembalikannya dengan cara pemberian.

Pergeseran prinsip-prinsip kewarisan dalam Adat Melayu di Kecamatan Nongsa berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada masyarakat Melayu Kecamatan Nongsa yang termasuk ahli waris adalah seluruh pihak-pihak yang diatur dalam *Al-Qur'an*, namun sekarang masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa ahli warisnya adalah lebih mengutamakan keluarga inti (yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak), daripada keluarga besar artinya walaupun kondisinya keluarga besar berhak juga atas harta warisan namun pembagian hanya diberikan pada keluarga inti saja, hal ini terkecuali jika pewaris belum menikah dan tidak mempunyai anak.¹²
2. Pembagian warisan masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa dahulu

¹² Wawancara dengan Syamsudin Ja'far, *Bidang Keagamaan LAM Batam* pada hari Senin, pada tanggal 12 Mei 2014.

menggunakan pembagian dengan cara hukum *faraid* saja yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, tetapi sekarang pembagian warisan tidak hanya sampai dengan cara *faraid* saja tetapi diikuti dengan proses pemberian, dan sebagian pihak tidak menggunakan hukum *faraid* tapi langsung membagi dengan sama rata menggunakan cara musyawarah dan mufakat artinya nilai nominal yang diterima tiap ahli waris adalah hasil dari musyawarah yang mana orang tua selalu menginginkan keadilan bagi tiap anaknya.¹³

3. Dalam pemberian harta warisan kepada anak maka dengan cara hadiah juga diakui dan dilakukan sebagai salah satu jalan untuk membagi harta warisan dengan adil antara anak laki-laki dan perempuan tanpa mengindahkan ajaran hukum Islam¹⁴
4. Kedudukan janda maupun duda lebih kuat dalam mengelola, menjual harta warisan dari suaminya karena tiap keluarga lebih cenderung menyelesaikan masalah pembagian warisannya tanpa ikut campur pihak luar. Artinya keluarga inti telah lebih berkuasa dalam mengatur pembagian warisan dalam keluarganya.¹⁵
5. Kedudukan anak perempuan juga lebih kuat artinya walaupun tidak ada anak laki-laki dalam keluarga namun anak perempuan lebih berhak atas harta orang tuanya artinya bagian anak perempuan walaupun pihak keluarga ayah ada yang mendapatkan bagiannya namun itu hanya bagian pemberian saja.¹⁶
6. Keinginan para pihak agar ada pengaturan harta warisan sebelum orang tua meninggal yang bertujuan agar kelak setelah orang tua wafat maka tidak ada perselisihan antara ahli waris.

Hal ini dapat dilihat pada keterangan yang diperoleh dari responden

¹³ Wawancara dengan Muhammad Ali Wasyim, *Ketua LAM Batam*, pada hari Rabu, pada tanggal 7 Mei 2014.

¹⁴ Wawancara dengan Amsakar Achmad, *Sekretaris LAM Batam* pada hari Senin, pada tanggal 12 Mei 2014.

¹⁵ Wawancara dengan Raja Zainuddin, *Penasehat LAM Batam*, pada hari Senin, pada tanggal 12 Mei 2014.

¹⁶ Wawancara dengan H. Mazlan M.Z., *Wakil Ketua III LAM Batam*, pada hari Senin, Pada tanggal 12 Mei 2014.

bahwa dalam hukum waris Islam apabila semua ahli waris berkumpul maka yang berhak mendapatkan bagian hanya ada lima orang yaitu anak kandung (laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, isteri (janda), suami (duda).¹⁷ Walaupun dalam hukum Islam jika tidak ada anak laki laki maka paman, saudara laki-laki dari ayah berhak atas warisan tersebut karena mereka merupakan wali bagi anak perempuan tersebut. Namun responden lebih dominan menjawab harta warisan tersebut adalah hak anak perempuan walaupun saudara laki-lakinya tidak ada.¹⁸ Menurut Raja Muhammad Zein hal itu lebih cenderung terjadi di masyarakat karena pada dasarnya masing-masing keluarga lebih mengutamakan keluarga intinya dan sesuai dengan yang terjadi anak perempuan adalah yang selalu mengurus orang tuanya.¹⁹

Menurut Raja Muhammad Zein hukum waris adat Melayu di Kecamatan Nongsa itu adalah hukum Islam, hukum adat itu sendiri bersendikan syara' dan syara bersendikan Kitabullah, jika terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain maka hendaklah perbedaan itu dikembalikan kepada hukum agama Islam, niscaya hal tersebut akan mendapatkan kesatuan pendapat.²⁰ Bagi responden yang taat pada hukum agama Islam dan tidak ingin melanggarnya/tidak ingin berdosa maka walaupun mereka sebagai orang tua ingin memberikan hak yang sama pada anak laki- laki dan anak perempuannya, terhadap cara pembagian warisan yang dilakukan di Kecamatan Nongsa dan yang menyatakan membagi harta warisan wajib menggunakan hukum *faraid* dengan alasan bahwa hukum waris Melayu adalah hukum Islam, dan karena kita beragama Islam maka sudah sewajarnya aturan hukum yang diikuti sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Setelah hukum *faraid* dilaksanakan dan semua pihak telah mendapat bagiannya sesuai dengan yang dtentukan secara *faraid* maka tanpa ada yang keberatan pihak yang mendapatkan bila memberi kepada saudaranya dengan proses pemberian sehingga masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Karena semua orang tua selalu ingin memberi keadilan pada anak-anaknya. Responden yang

¹⁷ Wawancara dengan Abdul Wahab, *Ketua Umum Yayasan (Tokoh Melayu)* pada hari Senin, Pada tanggal 12 Mei 2014

¹⁸ Wawancara dengan Abdul Wahab, *Ketua Umum Yayasan (Tokoh Melayu)* pada hari Senin, Pada tanggal 12 Mei 2014

¹⁹ Wawancara dengan Raja Muhammad Zein, *Peneliti Adat Lembaga Adat Melayu*, Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014

menyatakan dengan cara musyawarah menyatakan pembagian warisan sebaiknya dengan cara musyawarah secara langsung saja yaitu dibagikan sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan karena yang berbeda hanya jenis kelaminnya tetapi statusnya sama-sama anak kandung sendiri dilahirkan dari orang tua yang sama maka sudah sepatutnya sebagai orang tua harus memberikan keadilan bagi anak-anaknya, apalagi pada kenyataannya ketika orang tua sudah tua dan sakit-sakitan maka yang lebih peduli dalam merawat orang tua adalah anak perempuan bahkan bukan saja dari segi tenaga maka dari segi biaya merawat orang tua, maka sewajarnya anak perempuan mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki tidak dapat disalahkan jika tidak mempunyai waktu sehari-hari mengurus orang tuanya karena anak laki-laki harus bertanggung jawab penuh kepada keluarganya. Menurut responden diatas dengan langsung dibagikan sama rata lebih *efisien* dan menghindari pihak-pihak yang dapat berubah pikiran setelah pembagian jika melalui tahap *faraid* dahulu artinya bisa saja pihak tersebut setelah mendapatkan bagiannya berubah pikiran tidak akan mau memberi lagi kepada saudaranya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Waris Adat Melayu Di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepulauan Riau

Perkembangan modernisasi yang ada di kecamatan Nongsa mengakibatkan perubahan sistem pembagian warisan. Salah satu faktor penyebabnya menurut penuturan para ketua adat adalah karena kehidupan keluarga saat ini mengarah pada bentuk keluarga inti saja hingga mereka lebih suka mengurus kehidupan keluarga masing-masing, yaitu dalam pengurusan harta warisan hanya keluarga intinya saja tanpa ada campur tangan dari pihak luar, bahkan yang menerima warisan lebih cenderung anak dan istri atau suami yang ditinggalkan, yang mana mengenai jumlah harta warisan bersifat tertutup yaitu hanya keluarga inti saja yang mengetahuinya.

Budaya hukum yang ada di kecamatan Nongsa mempengaruhi pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Nongsa Kepulauan Riau, maka keluarga inti lebih diutamakan dan dalam proses pembagian warisan tersebut harus dapat memberi rasa adil pada semua ahli waris, yaitu rasa adil yang diberikan kepada

anak laki-laki maupun anak perempuannya dengan sama rata.²⁰

Pembagian warisan yang lebih berkeadilan ini dipengaruhi oleh perkembangan budaya hukum yang terjadi di Kecamatan Nongsa yaitu pengaruh adat-istiadat, peraturan perundang-undangan dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Nongsa yang sering dilakukan menjadi patokan bagi masyarakat bahwa hal yang sering dan selalu dilakukan berarti hal tersebut adalah benar, yaitu berkembangnya pola pikir masyarakat menuju modernisasi telah merubah kebiasaan yang adat-istiadat masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa dengan sistem keturunan *parental* dan sistem pewarisan bilateral yang bersumber pada hukum Islam mempengaruhi masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa tetap masih menjadikan hukum *faraid* sebagai dasar pembagian warisnya walaupun setelah itu ada proses pemberian dari saudara laki-lakinya kepada saudara perempuannya.

Faktor-faktor perubahan dalam pewarisan hukum Adat di Kecamatan Melayu Nongsa dapat dilihat juga dari tanggapan para responden mengenai pewarisan. Kebanyakan Responden yang menyatakan sikap setuju harta warisan diberikan hanya kepada keluarga inti saja, alasannya yang paling berhak terhadap harta warisan adalah keluarga inti khususnya adalah anak kandung sebagai keturunan langsung.

Adanya perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat adat akan mengakibatkan pembagian warisan tidak lagi banyak dilakukan lagi secara hukum adat, hal ini juga didukung dengan persamaan kedudukan dalam hukum antara wanita dengan pria yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini berarti menjamin persamaan kedudukan antara pria, wanita di muka hukum dan di dalam segala peraturan perundangan walaupun masih ada pembagian warisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku, yang didukung didukung dengan Azas Kesamaan dalam Hukum Waris Nasional. Menurut Hilman Hadikusuma azas kesamaan hak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang

²⁰ Wawancara dengan Raja Muhammad Zein, *Peneliti Adat Lembaga Adat Melayu*, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014.

modern, terutama bagi keluarga-keluarga yang telah maju dan bertempat tinggal di kota-kota dimana alam pikirannya cenderung pada sifat-sifat yang individualistis telah mempengaruhi dan ikatan kekerabatan sudah mulai renggang.²¹

Hukum kewarisan menurut KHI menganut salah satu asas bilateral, yakni seorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas ini secara tegas tercantum dalam QS. an-Nisa ayat: 7, 11,12, dan 176.

Pembaharuan dalam hukum Islam yang melahirkan peraturan-peraturan baru di pemerintahan seperti untuk perkawinan yaitu lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, adanya peraturan-peraturan dalam pemerintahan ini dapat mengatur dan menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan karena itu yurisprudensi yang lahir dari adanya putusan hakim dalam suatu kasus tertentu dapat dijadikan dasar hukum atau sumber hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dikemudian hari.²²

Dari putusan-putusan *yurisprudensi* memperlihatkan bahwa faktor-faktor *genealogis* yang dianut suatu masyarakat semakin berubah, tidak lagi menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam pembagian harta warisan, seperti di Kecamatan Nongsa hal ini juga mempengaruhi status seseorang dalam suatu keluarga untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembagian waris, dalam hal pengalihan harta peninggalan terjadi variasi yaitu untuk harta warisan yang beralih kepada ahli waris maka harta warisan beralih dengan cara pewarisan sedangkan untuk harta warisan yang beralih kepada anggota keluarga yang bukan ahli waris seperti anak angkat, maka dilakukan dengan cara selain pewarisan yaitu seperti hibah ataupun pemberian.²³

²¹ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuam Hukum dan HAM (1994)*, hal 88-89

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal 104.

²³ Wawancara dengan Bapak Tengku Faisal, *Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Riau*, Tanggal 08 Maret 2014.

C. Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Pada Masyarakat Melayu Di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepulauan Riau

Pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa maka pihak-pihak yang berhak membagi harta warisan tersebut, adalah ninik, mamak, orang-orang yang dituakan dalam kampung, ulama dan tokoh-tokoh adat. Mereka ini memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka telah mengetahui dan memahami tentang warisan dari pandangan agama Islam.²⁴

Pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa pada saat ini dilakukan langsung oleh orang-orang yang bersangkutan yang paling utama yaitu ayah atau ibu, jika ayah atau ibu sudah tidak ada maka saudara, paman, ninik mamak, datuk, nenek, ulama dan lain-lain. Jika terjadi sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga maka pihak-pihak pemuka agama maupun adat dipanggil sebagai pihak pembagi warisan.²⁵

Walaupun dalam ajaran agama Islam telah diatur mengenai pembagian warisan secara terperinci, namun aturan-aturan tersebut tidaklah menjamin bahwa ahli waris akan rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain adalah seperti berikut: 1) ahli waris tidak mengetahui dan memahami ilmu Faraid; 2) pembagian yang tidak adil, 3) memperebutkan salah satu harta warisan; 4) serakah; dan 5) harta warisan terkena proyek pembangunan pemerintah.²⁶

Salah satu sengketa warisan yang diselesaikan di Lembaga Adat Batam, yaitu:

Kasus I

Almarhum A meninggalkan lahan pertanian yang selama ini telah dikelola oleh B (anak tertua) dan hasilnya selalu dibagi dengan keenam saudara kandungnya yang lain. Tetapi setelah 10 tahun kemudian dua orang saudaranya yang lain yaitu B dan C ingin lahan pertanian tersebut dijual sedangkan keempat saudara kandungnya yang lain tidak ingin menjual tanah tersebut dan tetap memberikan hak kepada abang tertuanya untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Karena kedua bersaudara ini bersikeras ingin dijual maka permasalahan ini dibawa ke Lembaga Adat Melayu di Kecamatan Nongsa.

Maka ketua Lembaga Adat memanggil para pihak untuk duduk bersama

²⁴ Wawancara dengan Ali Wasyim, Ketua *Lembaga Adat Melayu Batam*, Pada hari Senin, Tanggal 7 Mei 2014.

²⁵ Wawancara dengan Abdul Wahab M, *Ketua Umum Yayasan*, pada hari Rabu, pada tanggal 7 Mei 2014.

²⁶ Wawancara dengan Mazlan M.Z, *Wakil Ketua III Lembaga Adat Batam* pada hari Senin, pada tanggal 12 Mei 2014.

menyelesaikan kasus ini, namun pihak yang ingin menjual tanah tersebut hanya seorang yang datang sedangkan saudara yang tidak menginginkan lahan tersebut dijual semuanya hadir. Maka akhirnya Ketua Lembaga Adat Melayu di Nongsa memutuskan dengan dasar yaitu: mengenai kepengurusan tanah yang menjadi warisan diatur dalam Pasal 189 ayat 1 kompilasi Hukum Islam, “*Bila warisan yang akan dibagi merupakan lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana seperti semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama oleh para ahli waris*”

Karena dalam kasus ini telah ada ahli waris yang ingin menjual lahan pertanian tersebut maka penyelesaiannya adalah berdasarkan Pasal 189 ayat 2 kompilasi Hukum Islam yaitu: “Bila ketentuan pada ayat 1 tidak dimungkinkan karena ada salah satu dari para ahli waris yang membutuhkan uang maka salah satu atau beberapa ahli waris yang lain dengan cara membayar harganya kepada ahliwaris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.”

Menurut Ali Wasyim, ahli waris yang lain juga tidak dapat menahan hak saudara-saudaranya yang menginginkan haknya dibagi, hal ini karena kedua saudaranya dapat fatwa waris ke pengadilan agama, berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yaitu, “Para ahli waris secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, jika ada pihak ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat menuntut ke Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan²⁷

Maka hasil dari penyelesaian kasus ini, keempat saudaranya membayar bagian kedua saudaranya yang menginginkan lahan pertanian ini dijual sesuai dengan bagiannya dan harga lahan pada saat sekarang ini., karena mereka semuanya laki-laki maka keempat saudara tersebut harus mengeluarkan 2/6 bagian untuk kedua saudaranya. Lahan Pertanian tersebut pada saat ini jika dijual maka harga pasarannya Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) maka keempat ahli waris tersebut harus mengeluarkan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kedua saudaranya. Sehingga masing-masing pihak dari keempat bersaudara ini harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta).

Demikian dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa peranan Lembaga Adat yaitu lebih diutamakan di Kecamatan Nongsa jika terjadi perselisihan

²⁷ Wawancara dengan Ali Wasyim, Ketua Lembaga Adat Melayu Nongsa, Pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014.

mengenai pembagian warisan daripada melalui jalur Pengadilan. Artinya sifat kekeluargaan di Kecamatan Nongsa masih sangat kental dan nasehat ketua-ketua adat dan ulama- ulama masih sangat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah atau perselisihan yang terjadi. Lembaga Adat juga sangat berperan dalam memperbaiki hubungan persaudaraan yang telah rusak akibat perselisihan yang terjadi.

Dapat dilihat beberapa perbedaan karakteristik dari peradilan negara dan Lembaga Adat berdasarkan sumber pengaturan, ruang lingkup operasi, potensi sumberdaya yang digunakan untuk penyelenggaraanya, dan tujuan akhirnya. Peradilan negara didasari oleh seperangkat aturan yang seragam, berlaku untuk semua orang dalam ruang lingkup yang luas, yaitu wilayah negara, dijalankan oleh aparat hukum dalam birokrasi negara. Cakupannya luas dan tujuan akhirnya adalah ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah (*win-lose solution*), karena substansi hukum lebih dipentingkan daripada prosedur. Sebaliknya berdasarkan sumber pengaturan, Lembaga Adat (musyawarah adat), dilandasi oleh *law ways* (cara berhukum) masyarakat lokal. Nilai-nilai adat, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lain sarat terkandung dalam hukum adat.

Hal ini mengindikasikan bahwa Pengadilan bukanlah pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa namun menjadi pilihan terakhir jika dalam lingkungan keluarga yang penyelesaiannya telah ikut ulama maupun tokoh adat namun tidak terselesaikan maka Pengadilan ditempuh/dipilih apabila penyelesaian di lingkungan keluarga tetap buntu. Pengadilan dipilih sebagai alternatif yang terakhir karena penyelesaian di Pengadilan berdampak kurang baik. Selain hubungan kekeluargaan dapat menjadi renggang atau retak, belum tentu hasil keputusan hakim di Pengadilan memuaskan pihak yang bersengketa dan agar memuaskan para pihak sesuai pendapat Arthur L Corbin, "*A judge who is ready to decide what is justice and for the public weal must have any knowledge of history and precedent*" (Seorang hakim yang siap menjatuhkan putusan tentang apa yang adil dan beri kebahagiaan publik, harus punya pengetahuan tentang sejarah dan preseden).²⁸

²⁸ Achmad Ali, *OpCit*, hal 448

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pergeseran prinsip-prinsip kewarisan dalam adat Melayu di kecamatan Nongsa dapat dilihat dari ahli waris pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa yang berhak menerima warisan adalah keluarga inti (suami, isteri dan anak-anak) kecuali jika pewaris belum menikah dan tidak mempunyai anak. Sistem pembagian warisan yang dahulu menggunakan hukum *faraid* saja, dengan nilai yang sudah ditentukan dalam Al-Quran bergeser menjadi pembagian warisan dengan hukum *faraid* yang diikuti dengan proses pemberian atau membagi secara langsung dengan bagian yang sama menggunakan cara musyawarah mufakat, jika tetap melaksanakan ajaran hukum Islam tetapi dengan tujuan memberi harta warisan yang sama maka pemberian, hadiah, hibah dapat dilakukan setelah proses *faraid* dilaksanakan terlebih dahulu demi mencari keadilan, setiap keluarga lebih cenderung menyelesaikan pembagian warisannya sendiri tanpa ikut campur keluarga lain.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum waris Adat Melayu di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepulauan Riau yaitu dari dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan yang mengakibatkan kehidupan keluarga telah mengarah hanya kepada keluarga inti saja, dengan lahirnya peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi menyebabkan para ahli waris mendapatkan bagian yang sama rata.
3. Peranan Lembaga Adat di kecamatan Nongsa kepulauan Kepri adalah lebih diutamakan dalam menyelesaikan sengketa waris daripada Pengadilan, artinya sifat kekeluargaan di Kecamatan Nongsa masih sangat kental dan nasehat ketua-ketua adat dan ulama-ulama masih dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi. Lembaga Adat juga sangat berperan dalam memperbaiki hubungan persaudaraan yang telah rusak akibat perselisihan yang terjadi.

B. Saran.

1. Disarankan agar dalam proses pembagian warisan seluruh pihak sebagai ahli waris tidak saling merugikan ahli waris lainnya dengan tetap mematuhi ajaran

dalam hukum Islam yang merupakan waris adat Melayu.

2. Terhadap faktor-faktor modernisasi yang mempengaruhi pergeseran prinsip-prinsip daripada pewarisan hukum waris adat Melayu di Kecamatan Nongsa agar tetap diperhatikan agar tidak menyalahi dari ajaran hukum Islam yaitu melanggar *Al-Qur'an* dan Hadits Nabi, dan juga memperhatikan hak azasi manusia yang kedudukannya sama dimata hukum.
3. Diharapkan agar Lembaga Adat Nongsa dapat selalu menjadi wadah yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah sengketa waris dengan asas keadilan dan tetap dapat menjaga keutuhan kekerabatan para pihak yang bersengketa dengan mengajak para pihak untuk berdamai.

IV. Daftar Pustaka

- Ali, Achmad *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ali, Muhammad Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Triginta Karya, 1995 Hanitijo Soemitro, Ronny *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta, Tinta Mas, Tanpa tahun.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta Tinta Mas, Tanpa tahun.
- Lah Husny, T.H.M *Lintasan Sejarah dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Sumatera Timur*, Penerbit BP Husny, Medan, 1975 Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, 1999.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rieneka Cipta, 1991.
- Sitepu, Runtung *Kapita Selekta Hukum Adat*, Medan, Bahan Kuliah Pada Program Studi S2, Ilmu Hukum Program Pasca Saijana Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan HAM*, 1994.